

RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19: STUDI DI DESA JAWISARI KABUPATEN KENDAL

Tiara Candra Wijayanti (tiaracandrawijayanti@gmail.com)
Muhammad Mahsun (muhammad.mahsun@walisongo.ac.id)

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on the health sector and the economy. This prompted the government to immediately take a policy of limiting social activities formulated in the PSBB and PPKM policies from levels 1-4. This policy received a lot of resistance in almost all regions in Indonesia, so many scholars were interested in finding the cause of the resistance carried out by the community in order to optimize the policies taken by the government regarding the handling of Covid-19. By reviewing the case of the resistance of the Jawisari Village community to the Covid-19 handling policy. This study seeks to answer two research questions. First, what is the form of resistance of the Jawisari Village Community to the Government's Appeal in Handling the Spread of Covid-19? Second, why are the people of Jawisari Village Resistant to the Government's Appeal in Handling the Spread of Covid-19? This study uses James Scott's theory of resistance which explains the resistance of the peasants due to the domination of the proletariat. This study uses a qualitative research method with a case study approach to obtain data on community resistance related to Covid-19 handling policies in Jawisari Village. Primary data were obtained from interviews, observations and literature studies of previous studies. This study found that the forms of resistance carried out by the people of Jawisari Village were divided into three forms, namely open resistance, closed resistance and defensive resistance. This study also found that there were several factors behind the resistance, including not getting BLT-DD, concern for education, fulfillment of daily life, pressure from the congregation, ineffective socialization and health workers who were less than optimal in dealing with the Covid-19 pandemic.

Pandemi Covid-19 membawa dampak yang signifikan utamanya pada sektor kesehatan dan ekonomi. Hal ini mendorong pemerintah untuk segera mengambil kebijakan pembatasan kegiatan sosial yang dirumuskan dalam kebijakan PSBB dan PPKM dari level 1-4. Kebijakan tersebut banyak mendapatkan perlawanan hampir di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga banyak sarjana yang tertarik untuk menemukan penyebab dari resistensi yang dilakukan masyarakat guna optimalisasi kebijakan yang diambil pemerintah terkait penanganan Covid-19. Dengan mengkaji kasus resistensi masyarakat Desa Jawisari terhadap kebijakan penanganan Covid-19. Kajian ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama Bagaimana Bentuk Resistensi Masyarakat Desa Jawisari Terhadap Himbauan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19? Kedua Mengapa Masyarakat Desa Jawisari Resisten Terhadap Himbauan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19?. Studi ini menggunakan teori resistensi James Scott yang menjelaskan mengenai perlawanan kaum tani akibat dominasi dari kaum proletar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh data mengenai resistensi masyarakat terkait kebijakan penanganan Covid-19 di Desa Jawisari. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi literatur penelitian terdahulu. Kajian ini menemukan bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jawisari terbagi menjadi tiga bentuk yaitu resistensi terbuka, resistensi tertutup dan resistensi defensif. Studi ini juga menemukan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perlawanan tersebut diantaranya tidak mendapatkan BLT-DD, kepedulian terhadap pendidikan, pemenuhan kehidupan sehari-hari, desakan jama'ah, sosialisasi yang kurang efektif serta tenaga kesehatan yang kurang maksimal dalam menangani pandemi Covid-19.

Keywords: Resistance, Covid-19, Policy, James Scott, Jawisari Village

Pengantar

Pada akhir tahun 2019, dunia digegerkan dengan munculnya penyakit Coronavirus Disease (Covid-19). Virus ini pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok yang menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia, termasuk Indonesia yang menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang terkonfirmasi dan 3,9 juta kematian per juni 2021 (Perasso, 2021). Di Indonesia sendiri kasus Covid-19 mulai muncul pada tanggal 2 maret 2020, dengan penyebaran cukup massif dimana pada akhir maret 2020, diketahui bahwa Satgas Penanganan Covid-19 mencatat adanya 1.528 kasus warga Indonesia yang positif Covid-19 yang mana 136 pasien meninggal dan hanya 81 pasien diantaranya dinyatakan sembuh (Hanum, 2021).

Salah satu diskursus yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat khususnya di Indonesia adalah mengenai penanganan pandemi Covid-19. Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah pada awal adanya Covid-19 adalah tidak memberikan kebijakan lockdown (karantina wilayah). Hal ini karena adanya pertimbangan mengenai dampak-dampak yang akan menyerang sektor ekonomi maupun sosial. Sebagai gantinya, pemerintah meberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang mana yang dimaksud PSBB ialah pemberlakuan pembatasan atas kegiatan yang dilakukan oleh penduduk pada wilayah tertentu yang diduga penduduknya telah terpapar virus Covid-19 dalam rangka pencegahan penyebarannya (Syafriada, 2020).

Usai penerapan PSBB, sejak Februari 2021 hingga 2022 pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dari level 1-4 (Nurita, 2021). Pemerintah juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) yaitu dengan memakai masker, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas (Satgas Penanganan Covid-19, 2021). Meskipun kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ini memiliki dampak yang besar dalam prespektif kesehatan, akan tetapi di sisi lain juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan negara diantaranya membuat laju perekonomian melemah. Dilihat dari banyaknya perusahaan yang terpaksa harus melakukan PHK terhadap pekerjanya secara besar-besaran, banyak pula usaha UMKM yang mengalami penurunan pendapatan sehingga terpaksa harus tutup (Syafriada, 2020).

Oleh sebab itu, tidak sedikit masyarakat yang kemudian melakukan perlawanan sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan terutama dalam hal mengurangi mobilitas akibat kebutuhan hidup yang mendesak sedangkan tidak ada jaminan kesejahteraan dari pemerintah. Selain itu, terdapat pula kasus penggunaan masker berdasarkan pemberitaan kompas.com, yang menjelaskan bahwa terdapat pelanggaran pemakaian masker di DKI Jakarta mencapai 316.754 kasus (Wiryo, 2021). Pelanggaran prokes dalam bentuk membuat kerumunan juga massif dilakukan terutama pada momentum tertentu, seperti halnya kasus yang sempat *viral* pada Juni 2021 silam, dimana salah satu perusahaan makanan cepat saji yaitu McDonald's (McD) meluncurkan menu BTS Meal yang merupakan hasil kolaborasi dengan salah satu boyband ternama asal Korea Selatan yaitu BTS. Ironisnya, antusiasme para fans boyband tersebut mengalahkan kepedulian akan kesehatan dan justru membanjiri gerai McD di beberapa daerah yang berujung pemberian sanksi (Henry, 2021).

Dari beberapa kasus perlawanan masyarakat atas kebijakan penanganan

covid di atas, menarik perhatian beberapa sarjana untuk mengkaji topik tersebut diantara kajian yang dilakukan oleh Hidayah (2021), Asharie, dkk (2022) dan Adifirsta (2021). Kajian-kajian tersebut memfokuskan pembahasan pada bagaimana resistensi yang dilakukan masyarakat dalam ruang publik yang berkaitan dengan dampak pada sektor ekonomi. Namun, kajian di atas belum memberikan eksplorasi yang mendalam mengenai bagaimana bentuk-bentuk perlawanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan juga faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perlawanan tersebut di level *grassroot*. Peneliti tertarik untuk melengkapi kajian tersebut terkait dengan perlawanan masyarakat terhadap kebijakan penanganan Covid-19. Kajian ini akan dilakukan dengan mengangkat kasus yang ada di Desa Jawisari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal.

Desa Jawisari, merupakan satu dari sekian banyak desa di Indonesia yang melakukan penolakan terhadap himbauan pemerintah mengenai protokol kesehatan sejak awal munculnya virus Covid-19 hingga saat ini. Padahal diketahui pada masa PPKM level 4 yang dilaksanakan pada 16 Juli 2021 hingga 20 Agustus 2021 kasus

Covid-19 di Desa Jawisari merupakan yang terbanyak selama masa Pandemi yaitu sebanyak 7 kasus. Desa Jawisari menjadi wilayah dengan kasus terbanyak pula di Kecamatan Limbangan pada periode tersebut. Meskipun telah mengetahui fakta tersebut, masih banyak masyarakat Desa yang tetap acuh terhadap himbauan pemerintah, dibuktikan dengan aktivitas keseharian masyarakat dengan mobilitas tinggi, masih tetap rutin mengadakan pengajian, melaksanakan sekolah secara luring bahkan tidak sedikit warga yang menggerombol di warung atau teras rumah dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa menggunakan masker.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji bentuk-bentuk resistensi masyarakat Desa Jawisari terhadap himbauan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19. Selain itu peneliti juga hendak mengkaji perihal kondisi-kondisi yang mempengaruhi atau membentuk sikap dan perilaku mengapa masyarakat Desa Jawisari melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang telah di ambil oleh pemerintah. Kajian ini penting dilakukan untuk mengungkap hubungan antara masyarakat dengan negara terkait sejauh mana masyarakat

dapat kooperatif dengan negara dalam penanganan pandemi Covid-19.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dimunculkan di atas, maka metode yang menurut penulis digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini tidak hanya menjawab secara sekilas mengenai suatu masalah melainkan dapat menjelaskan secara detail mengenai mengapa dan bagaimana masalah tersebut ada maupun diselesaikan. Dalam menulis penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen dan literature.

Menelaah Teori Resistensi James Scott

Dalam rangka mengkaji pola dan mengungkap akar resistensi masyarakat di Desa Jawisari dalam konteks kebijakan penanganan Covid-19 penulis menggunakan kerangka teori atau politik perlawanan yang digagas oleh James Scott dan teori yang sama yang dikembangkan oleh beberapa sarjana berikutnya. Studi resistensi sebenarnya bukan hal baru secara teoritis, studi yang dibangun oleh James Scott cukup kompleks karena menggabungkan beberapa tradisi teoritis

diantaranya kontroversi politik yang berhubungan dengan Negara dan masyarakat dan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kaum proletar kepada kaum borjuis dalam kehidupan sehari-hari.

Resistensi merupakan pemikiran yang terletak diantara pemikiran Marxisme dan antropologi simbolik yang memiliki maksud untuk menjadi jalan tengah atas dua pemikiran tersebut. Akhir tahun 1980-an resistensi menjadi primadona dalam menyelidiki kasus-kasus empiris. Resistensi sendiri dianggap bersifat kultural karena memanasifestasikan dirinya dalam ekspresi dan perilaku sehari-hari masyarakat (Panca, 2011). James Scott (1993) mendefinisikan resistensi sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh klien kepada patron yang mengambil kebijakan cenderung merugikan klien (Scott, 1993). Sedangkan resistensi menurut Ahmad Fauzie Ridwan dalam (Servatius, 2019) merupakan sebuah perlawanan yang menjadi reaksi terhadap adanya perubahan mendasar dalam suatu fenomena.

Perlawanan sering kali merupakan tindakan atas dominasi yang dibentuk oleh kaum-kaum penguasa atau pemilik modal. Kecemasan publik akan kehilangan haknya membawa masyarakat bersatu untuk

melakukan aksi berupa gerakan-gerakan yang ditujukan untuk melawan pemerintah maupun pemilik modal. James Scott (1993) telah mengabadikan bagaimana warga hidup dalam kesehariannya, mengenai sejarah serta perlawanan yang kaum tani lakukan terhadap tuan tanah karena turut andilnya negara dan agen perusahaan. Perlawanan petani di Asia Tenggara menunjukkan bahwa penindasan yang dilakukan oleh penguasa dalam bentuk mahalny biaya sewa tanah karena berkewajiban membayar untuk tuan tanah dan pajak negara. Kebutuhan subsisten memaksa petani untuk bersedia menjual tanah miliknya hingga satu persatu hak atas tanah pada daerah tersebut menjadi milik perorangan. Hubungan antara patron-klien yang awalnya bersifat mutualisme berubah drastis ketika pasar mulai dikuasai oleh paham kapitalis, paham ini kemudian memunculkan kelas-kelas dalam masyarakat. Bagi yang memiliki modal untuk bertahan dan yang tidak, tentu akan sulit mengembangkan usahanya, sedangkan petani mengembangkan pertanian hanya untuk menghidupi keluarganya daripada mencari keuntungan yang maksimal. Ketika petani menjual tanahnya dan bekerja untuk pemilik tanah yang kaya atau menjadi

penyewa, di sinilah ketimpangan sosial terjadi (Scott, 1993).

James Scott menggambarkan dengan jelas tentang perlawanan dan penolakan masyarakat minoritas lemah berhadapan dengan pemilik tanah dan pemerintah yang berkuasa. Perlawanan tersebut dibagi ke dalam dua bentuk yaitu perlawanan terbuka (public transcript) yang secara tipikal mendominasi kajian yang membahas mengenai perlawanan yaitu dengan tindakan yang terorganisir seperti melakukan pemberontakan bersama kelompok tertentu dan perlawanan tertutup (hidden transcript) yang merupakan perlawanan yang dilakukan baik dalam keadaan sadar maupun tidak yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki power untuk melawan secara terbuka. Perlawanan tersebut biasanya dalam bentuk umpatan, memunculkan sikap yang berlawanan dari kebiasaan dan lain sebagainya (Scott, 1993). Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai perbedaan perlawanan terbuka dan tertutup tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbedaan Bentuk Perlawanan

Perlawanan Terbuka	Perlawanan Tertutup
Terorganisir, sistematis, dan kooperatif	Tidak terorganisir, tidak sistematis, dan individual
Berprinsip/ tanpa pamrih	Bersifat untung-untungan dan berpamrih
Mempunyai akibat-akibat revolusioner	Tidak mempunyai akibat-akibat revolusioner
Mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri	Dalam maksud dan logikanya mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominasi yang ada

Sumber: Buku *Perlawanan Kaum Tani* karya James Scott

Sedangkan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Douglas dan Waskler, mengemukakan bahwa ada 4 model-model perlawanan. diantaranya yang pertama ialah perlawanan terbuka, yaitu merupakan perlawanan yang dapat disaksikan seperti perkelahian, demonstrasi, dan konflik. Kemudian yang kedua merupakan perlawanan

tersembunyi, perlawanan ini biasanya diwujudkan dengan perilaku mengancam baik dari umpatan, gunjingan dan ungkapan ketidaksetujuan terhadap sesuatu. Ketiga, perlawanan agresif yakni perlawanan yang dilakukan dengan memiliki maksud untuk mendapatkan hasil. Keempat ialah perlawanan defensif, yakni perlawanan yang dilakukan sebagai tindakan untuk melindungi diri sendiri (Santos, 2002).

Bentuk-Bentuk Resistensi Masyarakat Desa Jawisari Terhadap Kebijakan Penanganan Covid-19

1. Perlawanan Terbuka

Perlawanan terbuka merupakan tindakan yang terorganisir seperti melakukan pemberontakan bersama kelompok tertentu yang memiliki tujuan untuk mengubah kebijakan atau melengserkan jabatan pemangku kebijakan yang secara tipikal mendominasi studi tentang perlawanan (Scott, 1993). Pada hakikatnya, perlawanan masyarakat Desa Jawisari terhadap kebijakan penanganan Covid-19 tidak memiliki sesuatu yang terdapat dalam sejarah khas konflik pedesaan. Meskipun perlawanan dilakukan oleh masyarakat secara sadar di ruang

publik dan diketahui oleh semua pihak, namun tidak terjadi kekacauan, demonstrasi, pembakaran, kejahatan sosial yang terorganisasi, maupun kekerasan secara terbuka, melainkan pengambilan keputusan terorganisir yang melanggar kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19. Perlawanan-perlawanan tersebut diantaranya:

a. Tetap Melakukan Kegiatan Keagamaan

Jika dilihat dari keadaan sosial dan budayanya, Desa Jawisari memiliki potensi untuk melakukan perlawanan terbuka sebagaimana yang disampaikan oleh Scott. Sebagai desa yang menjunjung tinggi ajaran agama dalam kehidupan kesehariannya, agama sudah pasti menjadi faktor determinan di Desa Jawisari, dimana tokoh agama menjadi salah satu orang yang berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentu dapat menjadi modal besar bagi pemuka agama untuk mengkoordinir masyarakat melakukan pemberontakan kepada pemerintah agar dapat mengubah kebijakan yang ada atau mendapatkan kekuasaan.

Merebaknya virus Covid-19 mendorong pemerintah Desa Jawisari untuk meniadakan segala bentuk kegiatan sosial maupun keagamaan termasuk kegiatan tahlil tersebut. Hal ini dilakukan guna memutus rantai persebaran virus Covid-19 melalui kerumunan. Meskipun tidak melakukan pemberontakan hingga kekerasan secara terbuka, masyarakat Desa Jawisari melakukan tindakan pelanggaran kebijakan dengan melakukan budaya keagamaan berupa pengumpulan massa yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Jawisari yaitu tahlilan rutin (Wawancara, S, 3 Juni 2022).

Pengambilan keputusan tanpa adanya andil dari pemerintah desa menurut peneliti menjadi salah satu bentuk perlawanan terbuka yang memenuhi kriteria perlawanan terbuka pertama menurut Scott yaitu terorganisir, sistematis dan kooperatif. Dimana pelaksanaan kembali kegiatan pengajian rutin dilakukan tanpa melalui musyawarah resmi melainkan obrolan-obrolan santai antar warga. Informasi mengenai tetap diadakannya kegiatan pengajian tersebut kemudian dikoordinir langsung oleh masyarakat setempat dengan menyampaikannya melalui mulut ke mulut

dan WhatsApp Group (Wawancara, Z, 16 Mei 2022).

kegiatan tersebut tetap berjalan meskipun pemerintah desa kembali menghimbau untuk tidak membuat kegiatan yang mengumpulkan massa karena kasus di desa yang melonjak pada sekitar bulan Juli-Agustus 2021. Hal tersebut dibenarkan oleh tokoh agama Dusun Lebari yaitu Z “*Nggih, Mbak. Tahlile ora libur wes mangkat meneh, tapi aku tetep menghimbau warga untuk tetep nganggo masker*” (Ya Mbak, Ngajinya tidak libur, sudah berangkat kembali. Tapi saya tetap menghimbau warga untuk tetap memakai masker). (Wawancara, Z, 16 Mei 2022). Dan E selaku pengurus remaja Dusun Lebari “*Masio ora libur, tapi dewe tetep prokes kok Mbak*” (Walaupun tidak libur tapi kita tetap menerapkan protokol kesehatan kok) (Wawancara, Ellsa, 16 Mei 2022).

Hal ini berbeda dengan observasi yang telah peneliti lakukan pada Agustus 2021. Masyarakat yang melakukan tahlil masih banyak yang tidak menggunakan masker, kemudian tidak disediakan tempat cuci tangan maupun handsanitizer, selain itu pada beberapa kasus ada kalanya rumah warga yang menjadi lokasi tahlil tidak cukup luas sehingga tidak ada ruang untuk

menjaga jarak bahkan cenderung desak-desakan.

Gambar 1. Pelaksanaan Tahlil Ibu-ibu di Dusun Lebari



Sumber : Dokumentasi Pribadi Agustus 2022

Gambar 2. Pelaksanaan Pengajian Rutin Remaja Dusun Lebari



Sumber: Dokumentasi Pribadi 28 Agustus 2022

b. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan

Pandemi Covid-19 memberikan dampak besar pada sektor pendidikan (Massie, 2021). Pembelajaran pada seluruh jenjang dialihkan pada pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) / pembelajaran daring yang merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan, dan kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020. Di Desa Jawisari, peraturan mengenai peniadaan kegiatan pembelajaran secara luring yang diganti dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) telah disampaikan baik melalui pihak pemerintah Desa maupun Dinas Pendidikan Kecamatan Limbangan.

Pelanggaran terhadap kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan pendidikan secara luring dilakukan oleh TK Bhakti Pertiwi. Setelah mendapatkan informasi kaitannya dengan pemberlakuan belajar daring, TK Bhakti Pertiwi mengikuti aturan tersebut dengan melakukan kegiatan belajar-mengajar melalui pertemuan online pada *platform zoom meeting*. Selain itu pihak sekolah juga membuat WA Grup yang beranggotakan para guru dan wali murid siswa. Grup tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menyampaikan materi biasanya dalam bentuk video pembelajaran atau foto-foto

kegiatan yang harus dilakukan sekaligus berfungsi sebagai wadah pengumpulan tugas (Wawancara, W, 2 Juni 2022). Kurang efektifnya pembelajaran yang dilakukan di atas, membuat Kepala Sekolah TK Bhakti pertiwi menggunakan program baru yaitu '*Home Visit*'. *Home Visit* merupakan program yang dijalankan dengan cara mengumpulkan siswa maksimal berjumlah 5 anak dan mengunjungi rumah siswa yang dijadikan tempat pembelajaran untuk memberikan pembelajaran secara langsung dengan batasan waktu 30 menit (Wawancara, W, 2 Juni 2022).

Metode *Home Visit* dinilai masih kurang efektif karena perbandingan antara murid dengan pendidik yang tidak seimbang sehingga Kepala Sekolah TK Bhakti pertiwi kembali mengambil kebijakan untuk melakukan pembelajaran secara luring. Kebijakan yang diambil merupakan kesepakatan antar guru yang dilakukan secara langsung di kantor TK Bhakti Pertiwi sedangkan dengan wali murid dikoordinir lewat *WhatsApp Group* (Wawancara, W, 2 Juni 2022). Siswa dikumpulkan berdasarkan wilayahnya yaitu Dusun Krajan, Dusun Lebari dan Dusun Cemangklek yang dilakukan secara bergilir di rumah salah satu siswa. Pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan

secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat Desa Jawisari namun bersifat tersembunyi bagi Dinas Pendidikan Kecamatan Limbangan. sehingga Warti mengintruksikan kepada seluruh wali murid untuk tidak memposting kegiatan tersebut di media sosial.

Gambar 3. Pelaksanaan Pembelajaran Luring TK Bhakti Pertiwi



Sumber : Dokumentasi Kepala Sekolah TK Bhakti Pertiwi

Perlawanan tersebut sempat diketahui oleh Dinas Pendidikan Kecamatan Limbangan sehingga kepala dinas pendidikan Kecamatan Limbangan bersama-sama dengan pengawas TK/SD dan kepala Desa Jawisari melakukan peninjauan ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. Setelah membubarkan kegiatan pembelajaran memberikan kepala dinas pendidikan Kecamatan Limbangan sanksi berupa teguran langsung dan menyampaikan himbauan agar tidak lagi mengulang pelanggaran peraturan tersebut tanpa

adanya surat peringatan (Wawancara, Kamsin, 23 Mei 2022).

Selain itu, kegiatan sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan di Dusun Lebari yaitu Literasi juga masih tetap menjalankan kegiatannya. Literasi merupakan program kerja remaja Dusun Lebari untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak sekitar Dusun Lebari berupa pembelajaran formal hingga pembelajaran yang menunjang bakat dan minat anak. E selaku pengurus program Literasi tersebut menyatakan bahwa kegiatan Literasi sempat diliburkan dalam waktu yang cukup lama karena Covid-19 dan kembali di gelar pada awal tahun 2021 hingga saat ini (Wawancara, Ellsa, 16 Mei 2022).

Seperti yang sudah peneliti jelaskan pada pengantar sebelumnya, pada bulan Juli 2021 masyarakat Desa Jawiari yang terkonfirmasi terpapar Virus Covid-19 berjumlah 7 orang. Jika literasi dimulai pada awal tahun 2021 dan sampai saat ini belum diliburkan kembali, berarti ketika kasus Covid-19 di Desa Jawisari melonjak mereka mengetahui informasi tersebut. Menurut peneliti hal tersebut dapat membahayakan anak-anak yang ikut serta dalam program karena tidak ada pengawasan dari pihak yang lebih paham

mengenai penerapan prokes, meskipun tidak ditemukan kasus anak yang terpapar Covid-19 selama kegiatan literasi berlangsung.

Gambar 4. Kegiatan Literasi : Melukis Menggunakan Batang Pohon Pisang dan Pewarna Makanan



Sumber : Dokumentasi Pribadi Agustus 2021

2. Perlawanan Tertutup

Bentuk perlawanan kedua yang diagagas oleh James Scott adalah perlawanan tertutup. Perlawanan ini dikatakan tertutup karena aksinya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari

yang belum tentu orang tersebut sadar telah melakukan perlawanan. Sebagaimana kriteria perlawanan tertutup yang digambarkan Scott, perlawanan tertutup yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jawisari tidak terorganisir dan bersifat individual dimana perlawanan tersebut bersifat insidental, berpamrih, tidak memiliki akibar revolusioner dan dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap sistem dominasi yang ada. Konsep ini sama dengan konsep perlawanan tersebar yang diusulkan oleh Mona Lilja dan Stellan Vinthagen dalam *Journal of Political Power* yang menyatakan bahwa:

“Perlawanan ini mungkin dilakukan oleh satu (atau beberapa) individu atau muncul sebagai praktik perlawanan yang tidak terorganisir yang dilakukan oleh banyak aktor di tempat-tempat yang tersebar. Dalam kasus terakhir, perlawanan yang tersebar dapat memiliki dampak besar, dan mengubah masyarakat, komunitas, bangsa, atau bahkan seluruh wilayah” (Lilja, 2018).

Perubahan yang dimaksud dalam hal ini adalah perubahan perilaku yang memungkinkan untuk masyarakat lain diseluruh penjuru wilayah Indonesia melakukan perlawanan serupa. Apabila hal tersebut terjadi maka akan semakin sulit bagi pemerintah untuk mengendalikan laju

penyebaran virus Covid-19. Berikut bentuk-bentuk resistensi tersebut:

a. Tidak Menggunakan Masker Ketika Berada di Tempat Terbuka

Penggunaan masker merupakan salah satu bagian terpenting dalam pencegahan penularan Covid-19 utamanya ketika melakukan kontak langsung. Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020, Pemerintah Desa Jawisari mengambil kebijakan wajib memakai masker, yang mana seluruh masyarakat Desa Jawisari diwajibkan menggunakan masker ketika sedang berkegiatan di luar rumah baik itu untuk bekerja, berkegiatan sosial dan lain sebagainya. Selama melakukan observasi, peneliti menemukan tidak sedikit masyarakat yang tidak menggunakan masker ketika berkegiatan di luar rumah. Z salah satunya, Ia mengaku pernah membayar denda sejumlah 50 ribu rupiah lantaran tidak memakai masker ketika perjalanan pulang dari Boja.

"Padahal udah mau sampai rumah, aku kena razia di daerah Margosari kena denda 50 ribu, untung bawa uang lebih. Gak lagi-lagi deh keluar gak pake masker. Mana tetangga-tetangga pada tau, asli malu banget aku tiap hari dicengin" (Wawancara, Z, 25 Mei 2022).

Berdasarkan pengalaman narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa

pemberian sanksi merupakan salah satu hal yang efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran agar tidak kembali melakukan pelanggaran tersebut. Bagi sebagian warga yang sempat terkena razia atau minimal mendengar kabar bahwa telah dilakukan razia masker oleh pihak Satpol-PP Kecamatan Limbangan, wajarnya orang tersebut akan lebih hati-hati dengan tetap menggunakan masker ketika keluar rumah. Namun, karena masyarakat merasa razia tersebut tidak mungkin sampai ke dalam pemukiman warga (Wawancara, S, 27 Mei 2022), maka mereka tetap tidak menggunakan masker misalnya ketika berbelanja ke warung kelontong di sekitar rumah warga atau berbelanja sayuran di tukang sayur langganan mereka. Selain itu, Mereka juga berkumpul di teras rumah salah satu warga dan berinteraksi tanpa menggunakan masker.

Perlawanan tersebut mereka lakukan dalam kehidupan kesehariannya, namun ketika memenuhi undangan pemerintah misalnya dalam kegiatan musyawarah bersama perangkat, maka mereka mereka akan menggunakan masker. Baik masyarakat secara luas maupun perangkat desa sudah sama-sama mengetahui perihal perlawanan tersebut, namun memang

tidak ada tindakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka menangani kasus tersebut. Peneliti beranggapan penggunaan masker ketika kegiatan tersebut merupakan bentuk penghormatan yang bercampur dengan perasaan takut diberi sanksi baik dalam bentuk uang ataupun sanksi sosial, karena mereka sedang berada dalam forum resmi. Meskipun pemerintah Desa Jawisari sendiri tidak memberlakukan sanksi selain teguran kepada masyarakat yang melanggar. Peneliti menilai cara tersebut kurang efektif, karena sanksi berupa peringatan hanya akan dituruti ketika sanksi itu diberikan, tetapi akan kembali mengulang setelahnya.

Gambar 1. Warga Mengobrol di Teras Rumah Tetangga Tanpa Menggunakan Masker



Sumber : Dokumentasi Pribadi,
Agustus 2021

b. Menolak Vaksinasi Covid-19

Upaya pemberian vaksin oleh pemerintah dianggap sebagai salah satu solusi agar masyarakat terhindar dari penularan covid-19, namun fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang meragukan dan menolak untuk di vaksin. Sepertihalnya di Desa Jawisari, pada awal tahun 2021 ketika vaksinasi kepada masyarakat sudah mulai digencarkan, banyak masyarakat yang enggan untuk divaksin. Praktek pelaksanaan program vaksinasi di Desa Jawisari sendiri tergolong sudah cukup baik, dimana masing-masing satgas Covid-19 diberikan tugas untuk memberikan sosialisasi tentang vaksinasi kepada nama-nama warga yang tercantum dalam list yang sudah dibagi oleh sekertaris desa hingga Ia mau memenuhi undangan untuk melakukan vaksinasi. Meskipun demikian, vaksinasi tahap pertama diluar pejabat Desa dan PNS yang ditujukan untuk lansia, masih banyak kuota yang belum terpenuhi sehingga pemerintah harus mencari warga lain yang menyanggupi untuk divaksin di luar undangan.

Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang masih takut untuk divaksin akibat rumor yang beredar mengenai bahaya melakukan vaksinasi, ada

pula masyarakat yang tidak percaya adanya Covid-19. Golongan ini meyakini bahwa Covid-19 hanyalah penyakit biasa yang tidak perlu ditakuti, mereka juga menambahkan bahwa hidup dan mati itu di tangan Tuhan sehingga mereka lebih memilih untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan (Wawancara, A, 25 Mei 2022). Amin selaku Kasi Pemerintahan juga menambahkan bahwa yang melakukan perlawanan terhadap kebijakan vaksinasi tersebut tidak banyak, hanya sekitar 20% dari keseluruhan penduduk. *“Itupun sudah termasuk orang-orang yang tidak vaksin karena ada masalah kesehatan”* imbuhnya (Wawancara, Amin, 25 Mei 2022).

c. Menggosip

Menggosip merupakan salah satu jenis resistensi argumentatif. Dalam kasus ini, perlawanan lebih mengarah kepada pemerintah secara umum bukan pemerintah Desa Jawisari secara khusus. Tindakan ini lebih mudah dilakukan karena adanya kesamaan pemahaman di antara dua pihak atau lebih yang sedang berinteraksi. Begitu kebijakan-kebijakan pembatasan sosial mengenai Covid-19 diluncurkan, banyak masyarakat yang kemudian mengeluh dan membicarakan keresahannya terlebih dalam hal

pembatasan mobilitas dan peniadaan pembelajaran tatap muka. Selain itu, banyak berita-berita yang bermunculan mengenai pelanggaran-pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh petinggi pemerintahan.

Menyikapi hal tersebut orang-orang yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung saling mengemukakan pendapatnya. Sebagian besar mengenai ketisaksekapatannya terhadap hal yang sedang terjadi. Pada ruang interaksi tersebut, sasaran perundungannya adalah pihak ketiga yang tidak berada dalam ruang tersebut, dalam hal ini adalah pemerintah. Gosip disebut oleh Scott sebagai senjatanya orang-orang yang kalah (subordinat). Ia juga merupakan seni “perang” yang bertujuan untuk menjatuhkan reputasi pihak ketiga. Pada tindakan gosip ini, masyarakat kemudian membahas utamanya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.

Budaya menggosip yang dimiliki oleh masyarakat Desa Jawisari dalam hal ini semakin massif dipraktekkan. Peneliti berargumen meskipun terkesan tidak membahayakan karena tidak ada perlawanan secara terbuka yang melawan pemerintah, namun ketika ujaran yang disampaikan dalam obrolan tersebut

mendoktrin masing-masing orang yang terlibat maka akan timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah secara umum. Hal itu nantinya akan sangat menghambat jalannya pemerintahan dalam hal ini misalnya pelaksanaan kebijakan penanganan Covid-19.

d. Penarikan Rasa Hormat Kepada Pemerintah

Peneliti berargumen bahwa penarikan rasa hormat kepada penguasa diakibatkan oleh aktivitas menggosip yang telah peneliti jabarkan di atas. Rasa kecewa terhadap tindakan pemerintah yang justru memberikan contoh buruk atas pelanggaran kebijakan yang telah ditetapkan menjadi alasan terbesar masyarakat hilang respek terhadap pemerintah. Terlebih ketika menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan juru bicara penanganan Covid-19 Achmad Yurianto yang sempat menimbulkan kontroversi akibat pernyataannya yang kurang lebih meminta agar 'si miskin' tidak menularkan Covid-19 kepada 'si kaya'. Meskipun telah memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai konsep 'si kaya' dan 'si miskin' ini. Tetapi masyarakat masih tidak terima dengan pemaparan tersebut hingga

menumbuhkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah kepada pemerintah.

Selain itu, kebijakan pembatasan sosial yang berubah-ubah dan terus diterapkan oleh pemerintah nyatanya belum cukup efektif dalam menangani Covid-19. Sehingga masyarakat semakin meragukan kinerja pemerintah yang dianggap tidak maksimal seperti Negara-negara lainnya "*Negara lain sudah banyak yang memperbolehkan kegiatan pengumpulan massa, ga pake masker lagi. Indonesia masih disini-sini aja. Pemerintah ngapoin aja!*" (Wawancara, G, 30 Mei 2022).

3. Perlawanan Defensif

Sedangkan perlawanan ketiga ialah perlawanan defensif yang dalam pengertiannya Douglas dalam Santos (2002) yakni perlawanan yang dilakukan sebagai tindakan untuk melindungi diri sendiri dengan cara bertahan. Scott sendiri mengelompokkan perlawanan tersebut ke dalam perlawanan tertutup, misalnya kaum tani yang menyembunyikan barang-barangnya agar terhindar dari pajak sehingga dia memiliki cukup uang untuk hidup hari-hari setelahnya. Scott menyampaikan bahwa perlawanan tersebut merupakan bentuk dari bertahan

hidup dalam sesuatu yang pelik (Scott, 1993).

Dalam kasus ini wujud perlawanan tersebut adalah pelanggaran pengurangan mobilitas. Kebijakan tersebut diambil karena mobilitas manusia merupakan salah satu faktor yang turut mempercepat penyebaran virus Covid-19. Sepertihalnya yang terjadi di Cina, sebelum menetapkan status lockdown sebagian besar laporan mengenai kasus di Cina dilaporkan terjadi umumnya memiliki sejarah perjalanan dari kota Hubei. Adanya waktu yang dibutuhkan untuk gejala dapat muncul dan teridentifikasi sebagai orang terinfeksi Covid-19 memberikan kesempatan untuk virus tersebut dapat bertransmisi dari satu orang ke banyak orang lainnya di lokasi-lokasi berbeda (Yazid, 2020).

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa mobilitas masyarakat Desa Jawisari masih tergolong tinggi. Banyak ditemui warga yang berlalu-lalang keluar masuk Desa. Tetapi perlawanan tersebut dilakukan umumnya untuk bekerja dan beberapa untuk membeli kebutuhan pokok yang tidak tersedia di warung-warung terdekat (Wawancara, Amin, 25 Mei 2022). Perlawanan tersebut

dikategorikan sebagai perlawanan yang dilakukan untuk bertahan adalah kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Banyak kasus Covid-19 di Desa Jawisari yang bersumber dari masyarakat dengan mobilitas tinggi karena tuntutan pekerjaan. Kasus ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Asharie, dkk (2022) dimana perlawanan para nelayan di Desa Cilincing yang melakukan perlawanan dengan tetap melaut diluar jam yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui PSBB berdasar kepada pemenuhan kebutuhan untuk bertahan hidup.

Dalam pelaksanaan kebijakan Harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Ketika masyarakat membantu pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dengan patuh terhadap kebijakan yang diambil, maka presentasi kebijakan berjalan dengan maksimal akan meningkat. Namun ketika masyarakat justru resisten seperti yang telah peneliti sampaikan di atas maka juga akan berimbas kepada lancarnya pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jawisari masih belum kooperatif dengan pemerintah perihal penanganan pandemi Covid-19.

Faktor Penyebab Resistensi Masyarakat Desa Jawisari Terhadap Kebijakan penanganan Covid-19

James Scott (1993) dalam studi perlawanan kaum tani menjelaskan bahwa faktor penyebab timbulnya perlawanan dari kaum tani kepada pemilik tanah adalah hilangnya hak kaum tani atas tanah yang menciptakan eksploitasi dan penindasan yang dilakukan oleh penguasa dalam bentuk mahal biaya sewa tanah karena berkewajiban membayar untuk tuan tanah dan pajak negara. Kehilangan tersebut awalnya terjadi karena perubahan pasar yang dikuasai kapitalistik, selain itu pemilik lahan kecil sering bergantung pada elit bertanah misalnya untuk urusan pembelian benih, peralatan, transportasi dan pemasaran serta kadang-kadang kebutuhan kredit sehingga membuat hutang mereka semakin menggunung. Sepertihalnya kaum tani Sedaka yang ada di Malaysia, masyarakat Indonesia khususnya Desa Jawisari juga kehilangan hak kebebasannya karena kebijakan-kebijakan yang diatur pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19. Meskipun memiliki dalih untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi masih terdapat perlawanan-perlawanan atas kebijakan

tersebut. Berikut merupakan faktor –faktor yang menyebabkan masyarakat Jawisari resisten terhadap kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19:

a. Tidak Mendapatkan BLT-DD

Dampak dari pemilihan Kepala Desa tahun 2020 silam masih terasa hingga saat ini. Bagi perorangan yang masih belum dapat menerima sepenuhnya kekalahan atas calon yang didukung cenderung melihat apa saja yang dilakukan oleh Kepala Desa terpilih dalam sisi buruk (Wawancara, D, 3 Juni 2022). Hal ini sering terjadi di beberapa daerah yang hanya terdapat 2 kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala desa misalnya saja sengketa yang terjadi di Desa Werot Kabupaten Minahasa Utara. Kekalahan Steven Nelwan atas Fanly Walindow menyebabkan pendukung Steven Nelwan melakukan perlawanan-perlawanan berupa aksi kekerasan, pertikaian antar kedua belah pihak tersebut tak kunjung usai sehingga menghambat proses pemerintahan (Raras, 2018). Meskipun tidak sampai melakukan aksi kekerasan, ‘perang dingin’ yang menjadi konflik atas kedua kubu yang fanatik tetap menghambat pelaksanaan pemerintahan di Desa Jawisari.

Peneliti menemukan salah satu faktor penyebab masyarakat kemudian acuh dengan segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah penyaluran BLT-DD yang dianggap belum tepat sasaran.

“Mereka (Pemerintah Desa) saja tidak peduli dengan kita yang sedang susah, mengambil keputusan tanpa observasi. BLT-DD yang seharusnya diberikan kepada orang-orang yang terdampak Covid malah diberikan kepada orang mampu” (Wawancara, C, 27 Mei 2022)

Hal ini kemudian dikuatkan oleh beberapa narasumber lain yang menyatakan kebenaran bahwa penyaluran BLT-DD terkesan tidak terprogram dengan baik, dimana banyak orang-orang yang tidak memenuhi syarat kemudian menjadi salah satu penerima bantuan *“itu lho Mas R padahal suami istri sama-sama kerja tapi dapat sedangkan ibu B yang janda malah gak dapat apa-apa”* (Wawancara, S, 16 Mei 2022). Namun hal tersebut bukan menjadi alasan bagi narasumber lain dalam melakukan resistensi. Narasumber C menganggap bahwa bantuan tersebut diberikan kepada kerabat atau orang-orang yang mendukung Kepala Desa ketika Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Kepala Desa Jawisari membantah argumen tersebut dan menyatakan bahwa segala bentuk bantuan yang disampaikan kepada masyarakat Desa Jawisari telah

mengalami proses screening sesuai dengan prosedur yang ditentukan (Wawancara, D, 3 Juni 2022). Apabila dipandang dari sisi perkembangan sosial masyarakat Desa Jawisari bahwa masyarakat Desa Jawisari memiliki mental menerima bukan memberi (Wawancara, D, 3 Juni 2022), sangat dimungkinkan terdapat argumen seperti itu. Belum lagi ditambah pernyataan D yang beropini bahwa masyarakat Desa Jawisari itu mayoritas akan iri ketika melihat tetangganya mendapatkan sesuatu. Tidak peduli dia orang mampu atau bukan, ketika dia tidak mendapatkan hak seperti yang lainnya yang dalam hal ini adalah BLT-DD maka akan menuntut untuk mendapatkan hak serupa. Bisa jadi masih banyak masyarakat yang berpikir layaknya Narasumber C ketika melakukan perlawanan tetapi tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan.

b. Kepedulian terhadap pendidikan

Beberapa orang berpendapat bahwa pelaksanaan pembelajaran secara daring telah menurunkan mutu pendidikan di Indonesia (Winandi, 2020), hal itu disebabkan karena adanya banyak kendala ketika pelaksanaan pembelajaran. U selaku guru TK Bhakti Pertiwi menyampaikan kendala-kendala tersebut diantaranya:

ketidaktahuan pendidik maupun peserta didik mengenai teknologi yang digunakan dalam pembelajaran, terkendala oleh sinyal, tidak bisa membeli kuota internet, dan bahkan tidak memiliki cukup uang untuk membeli gadget. Tidak sedikit pula orang tua siswa yang mengeluh karena dituntut harus bekerja untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari sekaligus mengurus sekolah anak (Wawancara, U, 2 Juni 2022). Kendala-kendala tersebut yang kemudian mendorong Kepala Sekolah TK Bhakti Pertiwi melakukan perlawanan dengan melaksanakan pembelajaran secara luring. W juga menyampaikan bahwa pembelajaran secara daring sangat tidak efektif bagi anak didiknya. Karena kemampuan penerimaan materi yang bisa dikatakan belum optimal bagi anak TK.

“Cara memberikan pengajaran untuk anak SD, SMP, SMA dengan TK itu sangat berbeda nduk, perlu ketelatenan yang lebih. Anak TK adalah masa-masa dimana pondasi mereka dalam kehidupan dibentuk, saya khawatir kalau pondasinya saja sudah rapuh bagaimana kehidupan anak ini kedepannya? Saya sungguh memikirkan hal tersebut. Sebagai seorang guru saya merasa sangat bertanggung jawab atas perkembangan murid yang saya didik sehingga tidak cukup dengan kita menyampaikan pembelajaran tersebut lewat media online” (Wawancara, W, 2 Juni 2022)

Serupa dengan W, E mengungkapkan alasan tetap melaksanakan kegiatan literasi adalah rasa iba kepada anak-anak yang sering tidak paham dengan materi yang diajarkan. Selain itu, Ia semakin mantap kembali mengadakan kegiatan tersebut karena kegiatan pengajian rutin juga digelar kembali *“Aku mikirnya, tahlil aja udah mulai lagi jadi literasi kayanya bisa jalan”*.

Karena merasa terbantu oleh program-program tersebut, masyarakat Desa Jawisari justru menyambut secara positif. Wali murid dari masing-masing daerah berebut untuk mendapatkan giliran dalam pelaksanaannya. W menyampaikan antusiasme baik dari peserta didik maupun wali murid sama-sama membuat hatinya bergetar dan tidak menyesali perlawanan yang Ia lakukan *“Saya akui saya memang melanggar peraturan, tapi itu semua saya lakukan demi anak-anak”* imbuhnya (Wawancara, W, 2 Juni 2022).

c. Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari

Mayoritas masyarakat Desa Jawisari yang melakukan perlawanan dalam bentuk massifnya mobilitas adalah orang-orang yang bekerja di luar Desa Jawisari. Berdasarkan data agregat dispendukcapil Kabupaten Kendal tahun 2021, masyarakat

Desa Jawisari paling banyak berprofesi sebagai pegawai swasta yang didominasi oleh buruh pabrik. Sehingga mengharuskan mereka untuk sering keluar masuk desa sesuai penjadwalan tempat Ia bekerja. Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat pekerja tersebut bukan tanpa alasan, dibelakangnya ada keluarga yang harus dihidupi. Bergantung kepada bantuan pemerintah tidak akan cukup terlebih ketika orang tersebut adalah satu-satunya orang yang mencari nafkah dalam keluarganya. Hal ini sama dengan kasus petani Asia -Tenggara yang menyembunyikan beras serta barang-barang miliknya dari pengumpul pajak untuk menghindari pajak yang tinggi sehingga Ia memiliki cukup uang untuk menghidupi keluarganya (Scott, 1993). Scott yang menyampaikan bahwasannya tujuan kaum tani pada umumnya bukan untuk menumbangkan atau mengubah sistem dominasi, melainkan untuk bertahan hidup hari ini dan kedepannya. Pernyataan tersebut kemudian dikuatkan dengan kutipan dari Hobsbawn yang menyatakan bahwa tujuan kaum tani adalah bekerja dalam sistem dengan kerugian sesedikit mungkin.

Selain itu, terkait pelanggaran penggunaan masker. Salah satu alasan

Masyarakat Desa Jawisari tidak menggunakan masker ketika berada diluar ruangan adalah profesi mereka yang mayoritas adalah petani. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan petani adalah aksi nyata yang menguras tenaga sehingga ketika menggunakan masker maka udara yang mereka hirup akan terbatas dan justru berbahaya. *“Saiki ya mbak, mosok aku macul kon nganggo masker? Yo pengep raiso ambegan. Nek ora macul yo ora oleh duit, rak ndue duit yo rak iso mangan, kan ngono to”*(Sekarang ya Mbak, masa saya mencangkul harus memakai masker? Ya pengap Saya tidak bisa bernafas. Kalau tidak mencangkul Saya tidak punya uang kalau tidak punya uang Saya tidak makan, yakan?) (Wawancara, H, 25 Mei 2022).

Beberapa warga juga menambahkan mengenai keberatannya terhadap biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli masker medis yang dianjurkan oleh kementrian kesehatan. Bagi mereka menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari lebih bijak daripada harus dibelikan masker yang juga akan langsung habis sekali pakai, terlebih ketika awal merebaknya Covid-19 yang menyebabkan harga masker membumbung tinggi tahun 2020-an akibat oknum-oknum yang menimbun masker.

Pemberian masker dari pemerintah desa juga tidak dapat meng-cover kebutuhan masyarakat akan masker itu sendiri.

d. Desakan Jama'ah Tahlil

Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah Desa Jawisari adalah tidak melakukan kegiatan yang membuat kerumunan termasuk diantaranya melakukan pengajian tahlilan yang memang rutin dilaksanakan oleh masyarakat Desa Jawisari. Kebijakan ini kembali diambil setelah sebelumnya mulai berangsur diizinkan adalah karena ada masyarakat Desa Jawisari yang terkena Covid-19 yang mana ini merupakan kali pertama sejak munculnya virus Covid-19 di Indonesia. Meskipun demikian, masyarakat Desa Jawisari khususnya Dusun Lebari masih tetap mengadakan pengajian seperti biasanya. Salah satu alasan mengapa mereka tetap acuh adalah karena orang yang terpapar Covid-19 berada di Dusun Krajan sedangkan penduduk Dusun Lebari yang terindikasi terkena virus selama terpapar tidak menetap di Desa namun isolasi di rumah sakit. (Observasi, Agustus 2021)

Pelaksanaan pengajian rutin yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Lebari pasti tidak lepas dari tokoh agama yang

menjadi panutan masyarakat dalam menentukan pilihan. Namun Z selaku tokoh agama Dusun Lebari justru mengaku bahwa Ia tidak tau menau mengenai dilaksanakannya kembali pengajian rutin "*Aku yo rak ngerti Mbak, tiba-tiba ono sing ngomong "Mbah, mangkih Tahlile pangkat nggih"* (Saya juga tidak tau Mbak, tiba-tiba ada yang berbicara "Mbah, nanti Tahlilnya berangkat ya"). Z menambahkan bahwa selama ini masyarakat sering berkunjung ke rumahnya untuk menanyakan apakah kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tahlil sudah boleh dilakukan, tetapi Z selalu menjawab untuk menunggu hingga keadaan sudah membaik (Wawancara, Z, 16 Mei 2022).

Bagi masyarakat Desa Jawisari pengajian rutin dianggap sebagai salah satu ikhtiar untuk tetap yakin bahwa Allah pasti akan membawa kemudahan dalam setiap musibah. Sepertihalnya yang disampaikan oleh S:

"Sak niki Mbak, dongo yen dilakoni dewean karo dongo yen dilakoni bareng-bareng lak yo bedo. Doa nek bareng-bareng insyaAllah gusti Allah luwih gampang ngijabahi. Toh dewe yo pengene tetep Covid ndang rampung. Mosok agama dikalahke karo penyakit, ya to?" (Sekarang Mbak, doa kalau dilakukan sendirian dengan doa yang dilakukan bersama-sama kan berbeda. Doa kalau dilakukan bersama-sama insyaAllah Allah akan lebih mudah

untuk mengabdikan. Kita juga ingin Covid segera selesai. Masa agama dikalahkan dengan penyakit, ya kan?) (Wawancara, Sunirah 16 Meri 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut semakin menguatkan argumen Scott (1993) mengenai konsep keagamaan yang menyebutkan bahwa Islam memberikan doktrin yang kuat pada penganutnya agar memfokuskan kehidupan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat yang dilakukan melalui ibadah-ibadah keagamaan. Peneliti berargumen mereka menganggap bahwa ketaatannya dalam beribadah baik wajib maupun sunnah lebih penting dibandingkan dengan ketakutan terhadap virus Covid-19.

e. Sosialisasi yang Kurang Efektif

Untuk memberikan pengetahuan mengenai Covid-19, pemerintah Desa Jawisari melakukan program sosialisasi dalam beberapa kegiatan. Yang pertama adalah sosialisasi lewat media sosial yaitu Whats App (WA) Group (Wawancara, R, 2 Juni 2022).

Selain itu kegiatan sosialisasi lainnya juga disampaikan melalui kegiatan menyusur Desa menggunakan mobil pick-up dan menyampaikan himbuan untuk menerapkan protokol kesehatan menggunakan pengeras suara.

Berdasarkan penjabaran pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jawisari di atas, ada narasumber yang saya wawancarai yang menyatakan bahwa:

“Masih kurang banget Mbak, Saya akui Saya memang bukan remaja yang aktif di Desa mungkin saja pihak pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi kepada remaja desa tapi saya gak ikut. Tapi seharusnya sosialisai kan menjangkau semua orang jadi menurutku harusnya ada program yang lebih bagus lagi, tapi untuk sosialisasi dari desa sendiri Saya gak pernah dapet mbak, Saya tau info soal Covid ya dari internet”

Pelaksanaan sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Desa Jawisari menurut Rokhayati telah dilakukan yaitu sosialisasi yang disampaikan dari mulut ke mulut yang disampaikan oleh pihak RT ketika pelaksanaan tahlilan rutin, kemudian jamaah tahlil tersebut diminta untuk menyampaikan informasi soal Covid tersebut kepada seluruh anggota keluarganya (Wawancara, Rokhayati, 2 Juni 2022). Dari penyampaian Rokhayati ada beberapa kemungkinan mengapa sosialisasi tersebut berjalan tidak efektif. Yang pertama, pelaksanaan tahlilan rutin sempat ditiadakan selama beberapa bulan sehingga tidak ada wadah sosialisasi secara

langsung yang disampaikan oleh ketua RT. Selain itu, RT juga menginstruksikan untuk dapat mensosialisasikan kembali kepada keluarga di rumah. Namun realitanya tidak semua masyarakat Desa Jawisari mengikuti agenda agama tersebut. Selain itu, ada kemungkinan jamaah tahlil tersebut lupa untuk menyampaikan informasi tersebut kepada keluarganya. Informasi yang tidak sampai kepada seluruh penduduk utamanya adalah tidak transparannya pemerintah desa terhadap kasus yang ada di Jawisari. Informasi mengenai berapa dan siapa yang terpapar Covid-19 tidak menyebar secara menyeluruh juga tidak dapat diakses di portal desa, sehingga kewaspadaan masyarakat Jawisari juga kurang maksimal.

f. Tenaga Kesehatan yang Kurang Maksimal dalam Menangani Pandemi Covid-19

Bidan Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19. Sebagai profesi yang bergerak dalam bidang kesehatan, bidan desa merupakan garda terdepan untuk menggerakkan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di desa. Hal ini akan lebih mudah dilakukan ketika bidan desa berada di Poli Kesehatan

Desa (PKD) yang telah disediakan. Namun bidan Desa Jawisari tidak menempati poli tersebut karena tempat tinggalnya yang berada di desa sebelah Desa Jawisari.

Meskipun tidak tinggal di Desa Jawisari, tetapi bidan desa telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan edukasi terkepada masyarakat Desa Jawisari mengenai bahaya Covid-19 beserta cara mencegahnya.

S menyatakan bahwa ia selalu mengawasi pasien yang terpapar Covid-19 dengan memberikan sosialisasi secara langsung ke rumah warga yang terpapar terkait cara untuk melakukan isolasi mandiri. Namun hal tersebut tidak selaras dengan pernyataan A yang menyampaikan bahwa ia sempat merasa kebingungan ketika mengurus ayahnya yang terpapar virus Covid-19. Ia mengaku bahwa informasi mengenai tata cara isolasi mandiri ia dapatkan dari kawannya yang bekerja di bidang kesehatan (Wawancara, A, 25 Mei 2022). Usaha yang dilakukan oleh bidan desa tersebut juga dirasa masih kurang bagi sebagian masyarakat Desa Jawisari sendiri. Banyak yang mengeluhkan tentang kurang maksimalnya bidan desa dalam menangani Covid-19. Seperti yang disampaikan oleh E dan G berikut ini:

“Pernah Mbak, awal-awal ada Covid itu, ada warga yang baru pulang dari Cirebon. Itu kan dari luar daerah ya Mbak, jadi kita bingung harusnya bagaimana. Apa langsung isolasi mandiri di rumah atau harus cek dulu ke puskesmas. Nunggu kabar dari Bu bidan lama banget kasian bapaknya kedinginan karena abis di semprot disinfektan dan harus nunggu berjam-jam di pos kamling” (Wawancara, E, 16 Mei 2022)

“Bidan nggak tinggal di PKD tu sebenarnya masalah banget sih Mbak, apalagi pas masa kaya gini. Misal ada butuh obat atau tanya-tanya masalah Covid secara langsung juga gak bisa. Liat berita sekarang banyak yang ga bener jadi buat tau yang bener kemana lagi kalo bidan aja gak ada, mau chat juga sungkan” (Wawancara, G, 30 Mei 2022)

Selain itu, J juga menambahkan bahwa kurang maksimalnya bidan desa terkait penanganan Covid-19 karena bidan desa pernah positif terpapar virus Covid-19. Warga mengharapkan bidan desa dapat lebih aktif lagi dalam menanganani pandemi Covid-19. Karena mereka sangat membutuhkan bimbingan berupa informasi yang akurat dari tenaga kesehatan yang dapat dipercaya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai resistensi masyarakat Desa

Jawisari terhadap kebijakan penanganan Covid-19 dapat ditarik ke dalam beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Perlawanan-perlawanan yang terjadi di Desa Jawisari digolongkan ke dalam tiga bagian. Pertama yaitu perlawanan terbuka, menurut Scott perlawanan terbuka merupakan tindakan terorganisir yang biasanya berupa pemberontakan, namun perlawanan terbuka dalam kajian ini merupakan perlawanan terorganisir masyarakat Desa Jawisari terhadap kebijakan penanganan Covid-19 yang dilakukan secara terang-terangan dalam bentuk pengadaan pembelajaran secara luring dan pengadaan kegiatan keagamaan yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua adalah resistensi tertutup yang berupa pelanggaran pemakaian masker, penolakan vaksinasi, perlawanan argumentatif dalam bentuk menggosipkan pemerintah yang tidak taat kepada kebijakan dan penarikan rasa hormat terhadap pemerintah karena kehilangan kepercayaan dan perlawanan yang ketiga adalah perlawanan defensif yaitu perlawanan untuk pertahanan yang berbentuk mobilitas tinggi untuk bekerja.

Sedangkan faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Jawisari

melakukan resistensi adalah pertama karena tidak mendapatkan BLT-DD, bantuan tersebut dianggap tidak tepat sasaran sehingga memunculkan perasaan iri, kedua karena kepedulian penggiat pendidikan terhadap mutu pendidikan yang didapatkan oleh peserta didik, ketiga pemenuhan kehidupan sehari-hari merupakan alasan masyarakat untuk dapat terus bertahan hidup, keempat desakan jama'ah, pelaksanaan kegiatan keagamaan tetap diadakan karena adanya kesepakatan dari masyarakat yang menginginkan kegiatan keagamaan tetap berjalan, kelima yaitu sosialisasi yang kurang efektif, meskipun telah dilakukan beberapa praktek sosialisasi oleh pemerintah desa namun sosialisasi tersebut belum mencakup keseluruhan penduduk sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi lengkap mengenai Covid-19, serta yang terakhir adalah tenaga kesehatan yang kurang maksimal dalam menangani pandemi Covid-19, tidak menetapnya bidan desa di PKD menjadi masalah yang cukup krusial bagi masyarakat Desa Jawisari karena sulitnya mendapat informasi secara langsung dari

pihak tenaga kesehatan yang dapat dibuktikan kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adifirsta, Mayedha. (2021). Resistensi Kalangan Pengusaha Kafe dan Resto atas Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 . Dalam UMM Institutional Repository.
- Asharie, Henny Kurnia, Nadhira S Jasmin, dan Nandita (2022). Resistensi Nelayan Cilincing Di Masa Pandemi Covid-19. Dalam Jurnal Diskursus Pendidikan Sosiologi.
- Firdaus. (2020). Virus Corona Dalam Perspektif Sunnah. Jurnal Kajian Al-Quran & Tafsir.
- Hanum, Zubaedah. *Satu Tahun Perjalanan Covid-19, Maret yang Mencekam*. Dalam *mediaindonesia.com*: <https://mediaindonesia.com/humaniora/387702/satu-tahun-perjalanan-covid-19-maret-yang-menceka>, diakses pada 28 Maret 2022.
- Henry. *Kasus Antrean Panjang demi BTS Meal Berujung Penyegehan Gerai di Berbagai Kota*. dalam *Liputan6.com*. diakses pada 14 Maret 2022.
- Hidayah, Ahmad. (2021). Praktik Pendisiplinan Tubuh dan Resistensi Masyarakat Pelaku Usaha Wisata Bahari Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pulau Derawan, Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Dalam Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education.
- Lilja, Mona dan Stellan Vinthagen (2018). Dispersed resistance: unpacking the spectrum and properties of glaring and everyday resistance. *Journal of Political Power*.
- Massie, Alessandro Yosafat dan Kristina Roseven Nababan (2021). Dampak Pembelajaran Daring Terhadap Pendidikan Karakter Siswa. Satya Widya.
- Nurita, D. (2021). Gonta-ganti Istilah dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, Apa Bedanya? Diambil kembali dari Tempo.co.
- Panca, Tri. (2011). Resistensi Pedagang Masyarakat Sumber Arta Bekasi Barat. *Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Perasso, Britt Yip dan Valentina. *Asal Covid-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus corona ini?* dalam *BBC World Service*: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872>, diakses pada 15 Januari 2022.
- Raras, Brigita. (2018). Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Pasca Pemilihan Kepala Desa Werot Tahun 2016 di Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Politico*.
- Rustam, dan Sukring (Rustam, 2016). (2016). Pembrontakan terhadap pemerintahan yang sah (bugah) dalam perspektif hukum islam. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*.
- Santos, Thomas. (2002). *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia.

- Satgas Penanganan Covid-19. (2021). *Panduan Pelaksanaan Protokol Kesehatan*. Satgas Penanganan COVID-19.
- Scott, James (1993). *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Servatius, F. X. Fajar Ly No dan Rodriques. (2019). NEGARA VERSUS MASYARAKAT ADAT: Studi tentang Resistensi Masyarakat Adat Dhawe atas Keputusan Pemerintah Kabupaten Nagekeo tentang Alih Fungsi Lahan Mabay Kiri. Dalam *Warta Governare*
- Syafrida, Ralang Hartati. (2020). Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia. Dalam *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*
- Winandi, Galih Tegar (2020). *Perencanaan Pendidikan Pada Masa Pasca Pandemi Covid-19*. Universitas Negeri Semarang.
- Wiryono, Singgih. *Pelanggaran Tak Pakai Masker di Jakarta Capai 316.754 Kasus*. dalam *Kompas.com*. diakses pada 8 Februari 2022.
- Yazid, Sylvia dan Liliana Dea Jovita (2020). Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan*.